



**VANDIKO T. GULTOM, ST**  
BUPATI SAMOSIR

**Drs. MARTUA SITANGGANG, MM**  
WAKIL BUPATI SAMOSIR



**IKHTISAR**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**  
**(LPPD)**  
**KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

## **IKHTISAR LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022**

Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun ringkasan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut

### **1. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja Makro Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TAHUN 2021	TAHUN 2022	PERUBAHAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,83	71,67	1,17
2	Angka Kemiskinan	12,68	11,77	7,17
3	Angka Pengangguran	0,7	1,16	39,65
4	Pertumbuhan Ekonomi (jutaan rupiah)	3.162.101,03*	3.303.855,67**	4,48
5	Pendapatan Per kapita (ribu rupiah)	34.534,29*	37.077,36**	7,36
6	Ketimpangan pendapatan (rasio gini)	0,273	0,298	8,95

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir 2023*

*Keterangan: \* Angka Sementara; \*\* Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut didapatkan gambaran peningkatan capaian kinerja diantaranya yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia naik sebesar 0.84 poin dengan persentase perubahan sebesar 1,17 % jika dibandingkan dengan tahun lalu. Secara rinci Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

#### Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samsir

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN	
			2021	2022
1	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	71,41	71,82
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,48	13,50
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,44	9,46
4	Pengeluaran Perkapita	Ribu rupiah	8.504	8.991
Indeks pembangunan manusia			70,83	71,67

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Samsir 2023*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Samsir 2022 adalah sebesar 71,67 atau tumbuh 1,19 persen (meningkat 0,84 poin) dibandingkan capaian IPM 2021. Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Komponen IPM dengan pertumbuhan tertinggi pada 2022 adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan telah meningkat 5,73 persen dibanding 2021.

Dari sisi pendidikan, pada 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,50 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan 2021 yang mencapai 13,48 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,02 tahun, dari 9,44 tahun menjadi 9,46 tahun pada 2022.

Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,82 tahun, lebih lama 0,41 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun lalu.

2. Angka Kemiskinan di Kabupaten Samosir mengalami penurunan sebesar 0,91 Poin dengan persentase penurunan sebesar 7,17%. Hal ini berarti jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Samosir berkurang.
3. Angka Pengangguran di Kabupaten Samosir mengalami peningkatan sebesar 0,46 Poin dengan persentase peningkatan angka pengangguran sebesar 39,65%. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Samosir pada tahun 2022 bertambah sebesar 39,65% jika dibandingkan dengan tahun 2021.
4. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Samosir Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,48%, Pertumbuhan ini didapatkan dari pertambahan Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan 2010 dari 3.162,10 miliar rupiah pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.306,86 miliar rupiah. Laju pertumbuhan atas dasar harga konstan 2010 merupakan ukuran laju pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa perekonomian Kabupaten Samosir mengalami pertumbuhan sebesar 4,48 persen pada tahun 2022.
5. Pendapatan Perkapita Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 7,36% dari Rp34.534.290,- perorang pertahun di Tahun 2021 menjadi Rp.37.099.360,- perorang pertahun. Hal ini berarti pendapatan rata-rata di Kabupten Samosir meningkat di Tahun 2022.
6. Nilai Gini Ratio Kabupten Samosir Tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 0,025 poin dibandingkan dengan tahun lalu dengan persentase sebesar 8,95%. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1, nilai Gini Ratio yang semakin mendekati angka satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat.

## 2. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

NO	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	76.44
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98.12
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	77.60
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0.04
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.86
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	58.78
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	66
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	67.17
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	75.67
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	40.61
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65.17
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.40
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49.55		



NO	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	77.77
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5.42
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	91.66
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	41.69
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.05
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	21
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	61.31
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100

### **3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 DAN 2022.**

1. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.2.1.3-1109 TAHUN 2023 TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2022 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2021 MENDAPAT NILAI 2,43 (PERINGKAT 10 TINGKAT KABUPATEN SE-PROVINSI SUMATERA UTARA)
2. PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR MENDAPATKAN PREDIKAT **WTP** (WAJAR TANPA PEGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN TAHUN ANGGARAN 2022)

### **4. KEBIJAKAN KEUANGAN DAREAH TAHUN 2022**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Samosir sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 sampai dengan 2026. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 juga RPJM Nasional Tahun 2021-2024.

Arah kebijakan pembangunan di seluruh bidang/urusan pemerintahan yang diprioritaskan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing serta pembangunan daerah yang berkelanjutan, mantapnya reformasi birokrasi dan tata pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini dalam rangka pencapaian misi kepala daerah yakni:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih;
2. Membangun kemandirian ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Samosir menetapkan 10 program pembangunan daerah atau disebut juga sebagai program unggulan daerah yang dilaksanakan dengan kolaborasi antar semua *stakeholder* pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan tenaga medis yang handal;
2. Peningkatan kemampuan guru, pembangunan dan inisiasi sekolah vokasi/akademik komunitas dan pemberian beasiswa pada pelajar/mahasiswa kurang mampu dan berprestasi;
3. Pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Gratis;
4. Peningkatan dan pemerataan jalan dan jembatan penghubung antar desa dan pengadaan alat berat untuk pembukaan jalan;
5. Pembangunan infrastruktur jalan strategis kabupaten, irigasi, air bersih dan tata kelola persampahan;
6. Peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan internet di seluruh Kabupaten Samosir;
7. Menjalin kerjasama dengan investor dalam rangka pengadaan teknologi dalam penyediaan air minum;
8. Pembangunan pariwisata Samosir dengan melibatkan para pemuda dan masyarakat;
9. Menghadirkan 6 (enam) produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kabupaten berdasarkan potensi di 128 desa dan 6 kelurahan;
10. Ketersediaan pupuk dan bibit yang merata.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 adalah Peningkatan Kualitas SDM dan Percepatan Pemulihan Perekonomian

Masyarakat dengan Program Prioritas yang memperhatikan 10 (sepuluh) program unggulan yaitu:

1. **Prioritas I**

Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Penurunan angka **kemiskinan**

2. **Prioritas II**

Pencegahan, Penanganan, Penanggulangan wabah penyakit dan bencana

3. **Prioritas III**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

4. **Prioritas Daerah IV**

Pemulihan Ekonomi kerakyatan melalui kearifan local dan inovasi daerah

5. **Prioritas V**

Pengelolaan Industri Pariwisata yang berkelanjutan

6. **Prioritas Daerah VI**

Peningkatan Kuantitas dan kualitas sarana dan Prasarana Publik untuk mendukung Perekonomian Masyarakat serta KSPN danau Toba.

Dalam hal Pendapatan dan Belanja Daerah maka Belanja Daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sementara Pendapatan diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, belanja juga merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Adapun kebijakan keuangan dan perubahannya dijelaskan sebagai berikut:

**Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah diharapkan akan dapat menunjang atau melengkapi anggaran belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat telah dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Hal ini terus-menerus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Dengan upaya tersebut maka diharapkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sedikit demi sedikit akan dapat terwujud.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan prakiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, arah kebijakan pendapatan daerah yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah adalah meminimalisir penambahan beban bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah maka arah pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah atau pendapatan sewa;
- c. Pengelolaan administrasi penerimaan dilakukan secara benar, bertanggung jawab dan profesional;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas, dalam rangka pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak/retribusi daerah.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- b. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya;
- e. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga bulan Juni Tahun 2022.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dilaksanakan perubahan kebijakan pendapatan daerah pada perubahan kebijakan umum anggaran Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penyesuaian target PAD, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah;
2. Penyesuaian target Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik;
3. Penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### **Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah harus mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan belanja daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. *Merefocusing* anggaran dengan cara memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dan penanganan dampak inflasi;
2. Melakukan percepatan penggunaan APBD dengan prioritas untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan untuk pengaman sosial;
3. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan realokasi anggaran belanja tidak terduga untuk menambah belanja barang/jasa dan belanja modal dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait COVID-19 yang dikeluarkan

oleh satgas penanganan COVID-19 setempat dan ketentuan perundang-undangan dan/atau untuk mendanai keperluan mendesak;

4. Melakukan pencermatan dan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan SKPD yang tidak dapat dilaksanakan, dapat ditunda pelaksanaannya.

### **Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak menambah beban daerah dan pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo;
2. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun lalu akan dianggarkan sesuai penetapan perhitungan APBD tahun sebelumnya.

Rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah;
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;
5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan obligasi daerah.

## 5. INOVASI DAERAH

Adapun Inovasi dari Kabupaten Samosir yang di perlombakan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama Inovasi	Perangkat Daerah/ UPTD/ Unit Kerja	Jenis Inovasi
1	Pemberian Beasiswa untuk Siswa Miskin dan Siswa Berprestasi	Disdikpora	Pelayanan Publik
2	KAO (Kartu Kontrol Obat ODGJ) di Puskesmas Harian	PKM Harian	Tata Kelola Pemerintahan
3	CAPE OBAMA (Cara Penyimpanan Obat di Rumah) di Puskesmas Harian	PKM Harian	Tata Kelola Pemerintahan
4	Pemberian Tablet Tambah Darah Remaja Putri di Puskesmas Harian	PKM Harian	Pelayanan Publik
5	KEJAR BALITA (Kader Aktif Edukasi dan Jaring Balita) di Puskesmas Harian	PKM Harian	Tata Kelola Pemerintahan
6	KONSI (Kartu Kontrol Hipertensi) di Puskesmas Harian	PKM Harian	Tata Kelola Pemerintahan
7	Donor Darah untuk Masyarakat Khususnya Ibu Hamil di Puskesmas Harian	PKM Harian	Pelayanan Publik
8	Pemberian Sertifikat Graduation bagi Ibu Hamil yang Lulus Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Sitiotio	PKM Sitiotio	Tata Kelola Pemerintahan
9	GRAB JIBER (Gratis Antar Jemput Ibu Bersalin) di Puskesmas Sirait	PKM Sirait	Pelayanan Publik
10	Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) di Puskesmas Simarmata	PKM Simarmata	Tata Kelola Pemerintahan
11	Sertifikat Posyandu bagi Bayi Lulus Imunisasi Lengkap (LIL) di Puskesmas Mogang	PKM Mogang	Tata Kelola Pemerintahan
12	PENING MASS (Pengobatan Gratis, Screening PTM, Lansia, Masyarakat Sehat Senang)	PKM Lontung	Pelayanan Publik
13	Arisan Jamban di Puskesmas Limbong	PKM Limbong	Pelayanan Publik
14	GENTING (Generasi Anti Stunting): Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri di Puskesmas Onanrunggu	PKM Onanrunggu	Pelayanan Publik
15	GIATPEN SARTON (Kegiatan Penegakan Peraturan Pasar Percontohan dan PKL)	Satpol PP	Tata Kelola Pemerintahan
16	GIAT PBG (Kegiatan Penertiban Perizinan Bangunan Gedung)	Satpol PP	Pelayanan Publik
17	VAKSINASI RABIES MASSAL	DisKPP	Pelayanan Publik

<b>No</b>	<b>Nama Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah/ UPTD/ Unit Kerja</b>	<b>Jenis Inovasi</b>
18	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	DisKPP	Pelayanan Publik
19	Gerakan Bertanam Pohon (GABEHON)	Dislingkup	Pelayanan Publik
20	Pelayanan Jemput Bola	Disdukcapil	Pelayanan Publik
21	Penerbitan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir Langsung di Puskesmas	Disdukcapil	Tata Kelola Pemerintahan
22	PAMAN (PENGAMANAN) HARI KEGIATAN PEMKAB	Dishub	Pelayanan Publik
23	PAMAN (PENGAMANAN) HARI BESAR KEAGAMAAN	Dishub	Pelayanan Publik
24	PAMAN (PENGAMANAN) HARI LAINNYA	Dishub	Pelayanan Publik
25	WISATA BAGOT (TUAK ASLI SAMOSIR)	Disbudpar	Pelayanan Publik
26	SORGA (Wisata Sosor Galung) Desa Tamba Dolok	Disbudpar	Pelayanan Publik
27	Pokdarwis (Kelompok sadar Wisata) Wisata Pangaribuan	Disbudpar	Pelayanan Publik
28	Lembaga Adat dan Budaya	Disbudpar	Pelayanan Publik
29	NAPOSO NAINGGOLAN CREATIVE	Disbudpar	Pelayanan Publik
30	O2 Lumban Pokki	Disbudpar	Pelayanan Publik

## **6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

Permasalahan pembangunan menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat belum sesuai harapan. Mengacu kepada permasalahan yang ditemukan, selanjutnya dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pencapaian kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai potensi kondisi yang belum ideal di masa depan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

Permasalahan Strategis yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir diantaranya:

#### **1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Samosir, terutama yang dibangun oleh berbagai urusan penunjang pemerintahan masih berada pada kondisi yang belum optimal. Walaupun dari tata kelola keuangan yang dinilai dari Opini BPK Samosir sudah WTP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, namun akuntabilitas, penataan dan penguatan organisasi, perencanaan hingga pengawasannya belum optimal

#### **2. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki isu strategis kesehatan berupa rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Derajat kesehatan bermanfaat dalam memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang. Apabila derajat kesehatan rendah, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja penduduk.

#### **3. Rendahnya Daya Saing Pendidikan**

Identifikasi permasalahan dalam urusan pendidikan menunjukkan bahwa Kabupaten Samosir memiliki isu strategis berupa masih rendahnya daya saing pendidikan. Permasalahan tersebut direfleksikan oleh masih sedikitnya peserta didik di Kabupaten Samosir yang melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan. Sementara itu, pada level akses dan kualitas pendidikan, capaian pembangunan pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan dalam periode ini difokuskan untuk meningkatkan daya saing pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang handal, bermartabat dan berdaya saing dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang pendidikan yang lain.

4. Tingginya angka kemiskinan  
Tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir masih berada di level 2 digit dengan tren 2 tahun terakhir terus meningkat yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini menjadi perhatian karena tingkat kemiskinan ini masih berada jauh di atas tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang cenderung menurun dan mendekati 1 digit.
5. Kelestarian Budaya Asli Samosir Mengalami Degradasi  
Kabupaten Samosir memiliki kebudayaan yang cukup beragam baik kebudayaan yang bersifat benda maupun non benda. Akan tetapi, kekayaan dan keragaman kebudayaan Kabupaten Samosir selama ini mengalami degradasi yang disebabkan oleh kurangnya pengenalan budaya terhadap generasi muda Kabupaten Samosir dan masuknya pengaruh budaya asing.
6. Belum Optimalnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar  
Infrastruktur dasar yang berkualitas di Kabupaten Samosir masih belum merata. Masih terdapat daerah/kawasan yang tidak memiliki sarana/prasarana untuk menunjang penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, pertanian, pariwisata, perhubungan, dll
7. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup  
Menurunnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas air, udara dan tutupan hutan. Tingginya laju deforestasi akibat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan berakibat pada semakin menurunnya kualitas udara dan tutupan hutan. Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu (TPS-3R dan TPA) menyebabkan semakin besarnya volume pencemaran sampah dan penggunaan pestisida yang berkelanjutan yang berkontribusi pada pencemaran air.
8. Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi  
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor andalan utama. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal, akibat masih sedikitnya nilai investasi di Kabupaten Samosir. Pertumbuhan ekonomi juga yang berkualitas dilihat dari aspek keadilannya. Pertumbuhan ekonomi yang adil dinilai dengan indeks gini yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Samosir 5 (lima) tahun mendatang.
9. Ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas  
Dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 5 KSPN Super Prioritas bersama Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara), membuka peluang bagi pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba termasuk Kabupaten Samosir untuk mendapatkan pembangunan di segala sektor terutama dari Pemerintah Atasan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat). Dengan adanya KSPN Danau Toba ini, Pemerintah Samosir harus dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

## b. Visi dan Misi Kepala Daerah

### 1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah. Visi harus mampu menjelaskan menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat atau daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua elemen dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan, yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SAMOSIR YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT, SECARA EKONOMI, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN”**

Tabel 1.8

Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

<b>Pokok- Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
Samosir	Seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Samosir
Sejahtera	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Kabupaten Samosir untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Bermartabat	Berprilaku hidup berdasarkan nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak azasi manusia, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
Ekonomi	Mampu meningkatkan pendapatan diri sendiri dan keluarga melalui usaha-usaha sendiri maupun secara berkelompok.
Kesehatan	Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis
Pendidikan	Dapat mengembangkan potensi dirinya dengan tujuan mendapatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat

## 2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi.

Sesuai dengan Visi RPJMD ini, kemudian diturunkan kedalam 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih;
2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagai mana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.9  
Makna Misi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih	Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terarah, terbuka, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemilihan para penyelenggara pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang dapat bekerja secara efektif, responsif dan bersih
2.	Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas	Mengoptimalkan potensi sumber daya daerah (Pertanian dan Pariwisata) yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah
3.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	Meningkatkan sumber daya manusia yang handal, religius dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

## **7. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dengan menyusun dan menetapkannya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen/janji (kontrak) kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah sebagai penerima amanah, yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu. Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, yang diutamakan terhadap program utama yang menggambarkan keberadaan pemerintah daerah serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian kinerja ini pemerintah daerah akan dapat memantau dan mengendalikan pencapaian kerjanya, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Perjanjian kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil berupa peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2022 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026 yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2022. Target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya secara rinci dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Perjanjian Kinerja Bupati Samosir Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih</b>			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	1 Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Opini BPK	WTP
3	Meningkatnya inovasi	3 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,35
		4 IGA (Indeks Government Award)	Inovatif
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80
<b>Misi 2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas</b>			
5	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	6 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	1,75%
		7 Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	6,5%
6	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	8 Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	11,2%
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	65-75
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	10 Persentase jalan dalam kondisi mantap	58,06%
		11 Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	58%
		12 Persentase rumah layak huni	85%
		13 Persentase layanan air bersih	61%
<b>Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Sumber Daya Manusia yang berkepribadian dan berbudaya</b>			
9	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	14 HLS (Harapan Lama Sekolah)	13,48 Tahun
10	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	15 UHH (Umur Harapan Hidup)	71,42 Tahun
11	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	16 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	66,17%
		17 Pengeluaran perkapita	Rp 8.726.500,-
12	Meningkatnya pelestarian kebudayaan local	18 Persentase peningkatan jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi	16,3%

## 8. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Samosir selama periode lima tahun ke depan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026, telah ditetapkan tolak ukur beserta dengan target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Potret kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir tercermin dari 12 sasaran strategis dan 18 Indikator Kinerja dan beberapa pencapaian pembangunan terangkum dalam pencapaian sasaran berdasarkan evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2022.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Samosir, digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	90,01 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	75,01 ≤ 90%	Tinggi
3.	65,01 ≤ 75%	Sedang
4.	50,01 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

### 8.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Berikut pengukuran capaian

kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja Pemerintah kabupaten Samosir.

Target dan Capaian Kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	1 Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	B	99,81%	Tinggi	
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya inovasi	3 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,35	2,62	78,20%	Tinggi	
		4 IGA (Indeks Government Award)	Inovatif	Inovatif	100%	Sangat Tinggi	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Baik	Baik	100%	Sangat Tinggi	
Misi 2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas							
5	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	6 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	1,75%	4,59%	262,28%	Sangat Tinggi	
		7 Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	6,5%	10,98%	168,85%	Sangat Tinggi	
6	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	8 Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	11,2%	10,91%	89,43%	Tinggi	
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	65-75	69,96	100%	Sangat Tinggi	
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	10 Persentase jalan dalam kondisi mantap	58,06%	66,40%	114,36%	Sangat Tinggi	
		11 Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	58%	56,59 %	97,56 %	Sangat Tinggi	
		12 Persentase rumah layak huni	85%	82,56 %	97,12 %	Sangat Tinggi	
		13 Persentase layanan air bersih	61%	52,85 %	86,63 %	Tinggi	
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Sumber Daya Manusia yang berkepribadian							

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
dan berbudaya						
9	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	14 HLS (Harapan Lama Sekolah)	13,48 Tahun	13,5 Tahun	100,14%	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	15 UHH (Umur Harapan Hidup)	71,42 Tahun	71,82 Tahun	100,56%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	16 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	66,17%	83,57%	126,29%	Sangat Tinggi
		17 Pengeluaran Perkapita	Rp 8.726.500,-	Rp. 8.991.000,-	103,03%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	18 Persentase peningkatan jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi	16,3%	20,66%	126,74%	Sangat Tinggi

## 8.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	TAHUN 2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	1 Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	B	BB	B	99,81%	Tinggi
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya inovasi	3 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,16	3,35	2,62	78,20%	Tinggi
		4 IGA (Indeks Government Award)	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Baik	Baik	Baik	100%	Sangat Tinggi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	TAHUN 2022				
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Misi 2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas								
5	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	6	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	2,51%	1,75%	4,59%	262,28%	Sangat Tinggi
		7	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	8,31%	6,5%	10,98%	168,85%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	8	Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	14,25%	11,2%	10,91%	89,43%	Tinggi
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68,49	65-75	69,96	100%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	10	Persentase jalan dalam kondisi mantap	63,14%	58,06%	66,40%	114,36%	Sangat Tinggi
		11	Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	56,59%	58%	56,59 %	97,56 %	Sangat Tinggi
		12	Persentase rumah layak huni	82,56%	85%	82,56 %	97,12 %	Sangat Tinggi
		13	Persentase layanan air bersih	52,39%	61%	52,85 %	86,63 %	Tinggi
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Sumber Daya Manusia yang berkepribadian dan berbudaya								
9	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	14	HLS (Harapan Lama Sekolah)	13,48 Tahun	13,48 Tahun	13,5 Tahun	100,14%	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	15	UHH (Umur Harapan Hidup)	71,41 Tahun	71,42 Tahun	71,82 Tahun	100,56%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	16	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	84,38%	66,17%	83,57%	126,29%	Sangat Tinggi
		17	Pengeluaran Perkapita	Rp.8.504.000,-	Rp. 8.726.500,-	Rp. 8.991.000,-	103,03%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya pelestarian kebudayaan local	18	Persentase peningkatan jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi	14,23%	16,3%	20,66%	126,74%	Sangat Tinggi

### 8.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Akhir RPJMD

Adapun capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan target RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TARGET 2026
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Misi 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih						
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	1 Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB	B	99,81%	A
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2 Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP
3	Meningkatnya inovasi	3 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,35	2,62	78,20%	3,51
		4 IGA (Indeks Government Award)	Inovatif	Inovatif	100%	Sangat Inovatif
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Baik	Baik	100%	Baik
Misi 2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas						
5	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	6 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	1,75%	4,59%	262,28%	4,75%
		7 Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	6,5%	10,98%	168,85%	8,5%
6	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah	8 Persentase jumlah usaha kecil dan menengah terhadap total UMKM	11,2%	10,91%	89,43%	20,1%
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	65-75	69,96	100%	65-75
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	10 Persentase jalan dalam kondisi mantap	58,06%	66,40%	114,36%	74%
		11 Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	58%	56,59 %	97,56 %	70%
		12 Persentase rumah layak huni	85%	82,56 %	97,12 %	93%
		13 Persentase layanan air bersih	61%	52,85 %	86,63 %	64%
Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Sumber Daya Manusia yang berkepribadian dan berbudaya						

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TARGET 2026
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
9	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	14 HLS (Harapan Lama Sekolah)	13,48 Tahun	13,5 Tahun	100,14%	13,54 Tahun
10	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	15 UHH (Umur Harapan Hidup)	71,42 Tahun	71,82 Tahun	100,56%	72,01 Tahun
11	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	16 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	66,17%	83,57%	126,29%	80,11%
		17 Pengeluaran Perkapita	Rp. 8.726.500	Rp. 8.991.000	103,03%	Rp. 9.335.500
12	Meningkatnya pelestarian kebudayaan local	18 Persentase peningkatan jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi	16,3%	20,66%	126,74%	22,3%

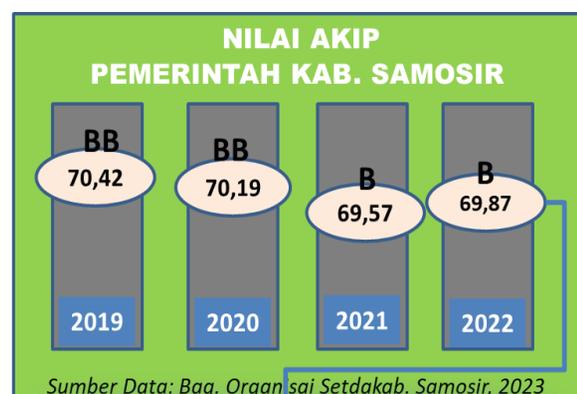
#### 8.4 Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

##### Sasaran ke - 1

##### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai tools untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, defenisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, konsisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin meningkat ditandai dengan:

1. Perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu, dan akuntabel;
2. Penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan;
3. Belanja aparatur yang semakin proporsional;
4. Belanja publik yang semakin dominan; dan



## 5. Perumusan kebijakan publik semakin responsif

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Samsir. Evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samsir Tahun 2022 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Samsir pada tahun 2022 memperoleh Predikat B dengan nilai sebesar 69,87. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi bahwa kinerja “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi komponen penilaian AKIP Tahun 2022 sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Komponen yang Dinilai</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>
1	Perencanaan Kinerja	30	24,02
2	Pengukuran Kinerja	30	16,20
3	Pelaporan Kinerja	15	11,18
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,47
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja adalah:

1. Menyusun Pohon Kinerja sesuai Permen PANRB 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengukur defenisi kinerja yang jelas dan terukur.
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level eselon 2 s.d. pegawai termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional melalui proses cascading kinerja.
3. Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui coaching clinic dan pendampingan dalam penyusunan pohon kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja.
4. Mendorong unit-unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi e-sakip dalam penyusunan rencana aksi dan melaporkan realisasi target kinerja secara berkala.
5. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan.

## Sasaran ke - 2

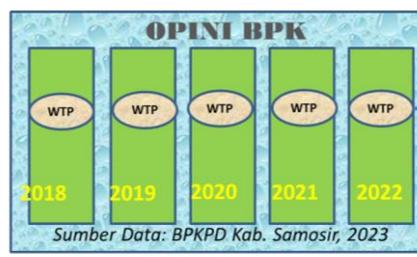
### Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan good governance pada penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan menurut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan di daerah. Salah satu prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Samosir yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) untuk ke - 5 (lima) kalinya pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diterbitkan oleh BPK jika laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji secara material. Upaya untuk mendapatkan opini tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperbaiki kinerja keuangan mulai dari kepala daerah sampai pada tingkat jabatan pelaksana. Sehingga terjadi sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaannya di SKPD se Kabupaten Samosir.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 Nomor 192.b/S/XVIII.MDN/04/2022 tanggal 28 April 2022, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, beberapa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih antara lain:

1. Adanya komitmen dari pengelola keuangan daerah yang terdiri dari pengelola keuangan SKPD dan SKPKD untuk selalu berupaya mewujudkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengangkat ASN dengan pendidikan keuangan/akuntansi atau ekonomi/manajemen yang akan ditempatkan sebagai pengelola keuangan SKPD
3. Mengangkat pejabat struktural yang berfungsi sebagai PPK SKPD secara berkesinambungan sehingga memiliki pengalaman pada sektor keuangan SKPD
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah mengingat adanya perubahan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
5. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan bagi pengelola keuangan SKPD sehingga pengetahuannya makin meningkat



### Sasaran ke - 3

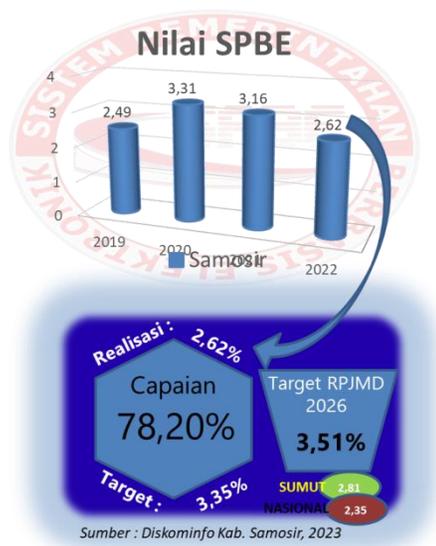
#### Meningkatnya Inovasi

Penguatan Sistem Inovasi Daerah juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan Kabupaten Samosir. Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi. Strategi efektif guna membangun pola pikir untuk peningkatan pembangunan daya saing adalah melalui kolaborasi dengan membangun networking antara pemerintah (pusat/daerah), bisnis dan perguruan tinggi. Komponen tersebut kemudian melakukan evaluasi kerangka regulasi untuk mendorong kolaborasi bersama dalam pembuatan kebijakan insentif (sistem maupun nominal) serta peningkatan jiwa kewirausahaan. Inovasi tidak dapat berjalan secara parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem inovasi. Penguatan sistem inovasi di Kabupaten Samosir dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi dengan bergeser pada sektor industri pariwisata.

#### ➤ Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan

Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.



Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Hasil pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Indeks SPBE Kabupaten Samosir pada tahun 2022 sebesar 2,62 dengan Predikat BAIK dan persentase capaian sebesar 78,20% menurun dari tahun 2021 yakni 3,16. Indeks SPBE Kabupaten

Samosir masih diatas Indeks SPBE Nasional yang masih diangka 2,35 dan dibawah Indeks SPBE Sumatera Utara diangka 2,81.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Indikator Kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

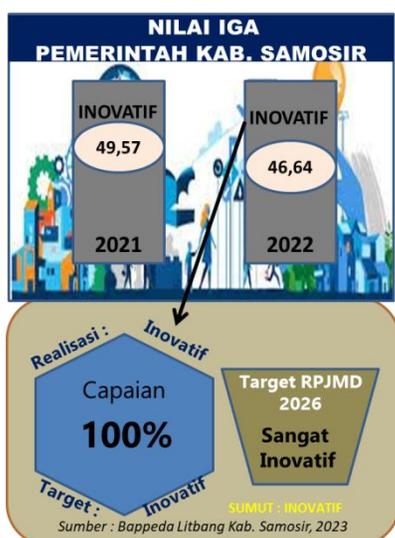
1. Perlunya pembaharuan kebijakan terkait pelaksanaan SPBE yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
2. Infrastruktur TIK yang masih perlu diperbaharui.
3. Manajemen penerapan SPBE yang masih perlu dilakukan penguatan secara periodik.
4. Belum tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten untuk melakukan Audit TIK.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks SPBE ke depan adalah:

1. Menetapkan acuan untuk tata kelola pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:
2. Menetapkan kebijakan, strategi dan standar-standar bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Membentuk Tim Asesor Internal yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4. Melaksanakan koordinasi antar Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Sektoral guna kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
5. Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait dengan perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

#### ➤ **IGA (Innovative Government Awards)**

Penganugerahan Innovative Government Award kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.



Inovasi yang dilakukan di Kabupaten Samosir merupakan salah satu kebijakan strategis dalam peningkatan dan percepatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Inovasi yang telah diinput kedalam aplikasi Kemendagri tahun 2022 berjumlah 30 (tiga puluh) inovasi, yang terbagi atas inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik. Dimana kriteria penilaian inovasi tersebut adalah berdasar kelengkapan Regulasi seperti Peraturan Bupati, SK Bupati, SK Kepala OPD,

SK inovator, dukungan ketersediaan SDM, dukungan anggaran, Penggunaan Teknologi dalam Inovasi, Pelaksanaan Bimtek Inovasi, Kesesuaian Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah, Pelaksanaan Inovasi daerah, Jejaring Inovasi, Sosialisasi Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Kemudahan Informasi Layanan, Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Online Sistem, Replikasi, Kecepatan penciptaan inovasi, Kemanfaatan Inovasi, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah. Kelengkapan-kelengkapan tersebut diatas di buktikan dengan dokumen laporan, foto, video beserta dengan bukti dukung lainnya.

Sesuai dengan Radiogram Nomor: 000.10/398/BSKDN tanggal 30 Januari 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11 – 6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022.

Adapun Inovasi dari Kabupaten Samosir yang di perlombakan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah/ UPTD/ Unit Kerja</b>	<b>Jenis Inovasi</b>
1	Pemberian Beasiswa untuk Siswa Miskin dan Siswa Berprestasi	Disdikpora	Pelayanan Publik
2	KAO (Kartu Kontrol Obat ODGJ) di Puskesmas Harian	PKM Harian	Tata Kelola Pemerintahan
3	CAPE OBAMA (Cara Penyimpanan Obat di Rumah) di Puskesmas Harian	PKM Harian	Tata Kelola Pemerintahan
4	Pemberian Tablet Tambah Darah Remaja Putri di Puskesmas Harian	PKM Harian	Pelayanan Publik
5	KEJAR BALITA (Kader Aktif Edukasi dan Jaring Balita) di Puskesmas Harian	PKM Harian	Tata Kelola Pemerintahan
6	KONSI (Kartu Kontrol Hipertensi) di Puskesmas Harian	PKM Harian	Tata Kelola Pemerintahan
7	Donor Darah untuk Masyarakat Khususnya Ibu Hamil di Puskesmas Harian	PKM Harian	Pelayanan Publik
8	Pemberian Sertifikat Graduation bagi Ibu Hamil yang Lulus Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Sitiotio	PKM Sitiotio	Tata Kelola Pemerintahan
9	GRAB JIBER (Gratis Antar Jemput Ibu Bersalin) di Puskesmas Sirait	PKM Sirait	Pelayanan Publik
10	Pembentukan Satuan Tugas Percepatan	PKM	Tata Kelola

<b>No</b>	<b>Nama Inovasi</b>	<b>Perangkat Daerah/ UPTD/ Unit Kerja</b>	<b>Jenis Inovasi</b>
	Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) di Puskesmas Simarmata	Simarmata	Pemerintahan
11	Sertifikat Posyandu bagi Bayi Lulus Imunisasi Lengkap (LIL) di Puskesmas Mogang	PKM Mogang	Tata Kelola Pemerintahan
12	PENING MASS (Pengobatan Gratis, Screening PTM, Lansia, Masyarakat Sehat Senang)	PKM Lontung	Pelayanan Publik
13	Arisan Jamban di Puskesmas Limbong	PKM Limbong	Pelayanan Publik
14	GENTING (Generasi Anti Stunting): Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri di Puskesmas Onanrunggu	PKM Onanrunggu	Pelayanan Publik
15	GIATPEN SARTON (Kegiatan Penegakan Peraturan Pasar Percontohan dan PKL)	Satpol PP	Tata Kelola Pemerintahan
16	GIAT PBG (Kegiatan Penertiban Perizinan Bangunan Gedung)	Satpol PP	Pelayanan Publik
17	VAKSINASI RABIES MASSAL	DisKPP	Pelayanan Publik
18	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	DisKPP	Pelayanan Publik
19	Gerakan Bertanam Pohon (GABEHON)	Dislingkup	Pelayanan Publik
20	Pelayanan Jemput Bola	Disdukcapil	Pelayanan Publik
21	Penerbitan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir Langsung di Puskesmas	Disdukcapil	Tata Kelola Pemerintahan
22	PAMAN (PENGAMANAN) HARI KEGIATAN PEMKAB	Dishub	Pelayanan Publik
23	PAMAN (PENGAMANAN) HARI BESAR KEAGAMAAN	Dishub	Pelayanan Publik
24	PAMAN (PENGAMANAN) HARI LAINNYA	Dishub	Pelayanan Publik
25	WISATA BAGOT (TUAK ASLI SAMOSIR)	Disbudpar	Pelayanan Publik
26	SORGA (Wisata Sosor Galung) Desa Tamba Dolok	Disbudpar	Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Perangkat Daerah/ UPTD/ Unit Kerja	Jenis Inovasi
27	Pokdarwis (Kelompok sadar Wisata) Wisata Pangaribuan	Disbudpar	Pelayanan Publik
28	Lembaga Adat dan Budaya	Disbudpar	Pelayanan Publik
29	NAPOSO NAINGGOLAN CREATIVE	Disbudpar	Pelayanan Publik
30	O2 Lumban Pokki	Disbudpar	Pelayanan Publik

Melalui penilaian dan penghargaan IGA ini, diharapkan dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah, untuk terus melakukan inovasi daerah dalam meningkatkan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan Kabupaten Samosir untuk mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Inovatif adalah:

1. Aktif turut serta pada proses penilaian Innovative Government Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
2. Aktif berkoordinasi dan mendukung semua OPD dalam upaya menciptakan inovasi baru terkait meningkatkan pelayanan publik, Inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi lainnya sesuai urusan pemerintah lainnya;
3. Inovasi yang berbasis aplikasi didukung penuh dengan Tenaga IT Kabupaten yang kompeten.

#### **Sasaran ke - 4**

##### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada *stakeholder*. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan dari para *stakeholder* yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya aparatur yang langsung berhadapan dengan *stakeholder*. Oleh karena itu diperlukan adanya aparatur yang profesional dengan sikap atau budaya melayani dengan setulus hati sehingga diharapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari *stakeholder* atas pelayanan yang diberikan.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah *attitude* atau perilaku. Yaitu, diperlukan sikap mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan

dengan *stakeholder* dalam pemberian layanan. Sikap baik ini tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini, dimana *stakeholder* dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu diperhatikan, sebab seprofesional apapun aparatur penyelenggara pelayanan publik bila memiliki sikap yang bobrok dan integritas yang rendah hanya akan menimbulkan ketidakpuasan lain dari *stakeholder*.

Dengan demikian peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Kondisi birokrat yang memiliki kompetensi, kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik yang andal.

➤ **IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.



Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase OPD dengan nilai IKM “Baik” mencapai 100%. Artinya seluruh OPD Pelayanan Publik telah melaksanakan Pelayanan Publik kepada masyarakat dengan kategori baik dan memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.

Data hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara lengkap yang disusun sesuai peringkat, adalah sebagai berikut:

No.	Organisasi Daerah	Perangkat	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan	IKM Unit Pelayanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		A	Sangat Baik	91,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		A	Sangat Baik	91,00
3	Dinas Kesehatan		B	Baik	85,50
4	RSUD dr. Hadrianus Sinaga		B	Baik	84,02

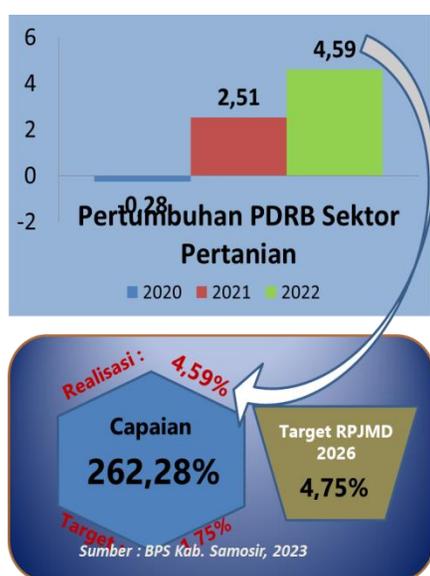
5	Dinas Pelayanan Modal Satu Pintu	B	Baik	83,61
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	B	Baik	80,47
<b>Rata-rata</b>		<b>B</b>	<b>Baik</b>	<b>85,93</b>

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas.
2. Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
3. Budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat dengan baik.
4. Semua Inovasi diupayakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir atau paling rendah ditetapkan dengan Peraturan Kepala OPD.

#### Sasaran ke - 5

#### Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan



Pertanian dan Pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Samosir, sektor ini menjadi sektor yang sangat strategis di Kabupaten Samosir. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir. Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan adalah Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD.

#### ➤ **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**

Perekonomian Kabupaten Samosir pada tahun 2022 mengalami tren positif pasca pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir yang di ukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 5.166,25 miliar rupiah. Terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 411.02 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,48%.

Pada tahun 2020, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian mengalami penurunan sampai dengan minus 0,28, sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir membuat terobosan untuk menaikkan PDRB Sektor Pertanian.



Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah meluncurkan Pangula Nature dengan Motto “Bertani Selaras Alam” dengan berbagai terobosan, membina dan mendampingi petani dalam Pembuatan dan pemakaian pupuk dan

pestisida organik, pengaturan pola tanam serentak dengan kajian ilmiah dan kearifan lokal, pembuatan dan penggunaan pakan organik, pembentukan kelompok tani peduli api.

Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia yaitu antara lain Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Dilansir dari Hunker, asam klorida dan asam sulfat dalam tanah melarutkan remah-remah tanah yang kaya akan mineral.



Menunjang Program Pangula Na Ture Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memberikan beberapa bantuan diantara lain :

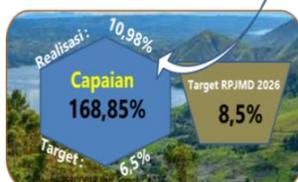
1. Pemberian Pupuk Organik Padat sebanyak 350.000 kg
2. Pemberian Pupuk Organik Cair Sebanyak 9.500 Liter
3. Pendampingan pembuatan POP sebanyak 172 Kelompok Tani
4. Pendampingan pembuatan POC sebanyak 107 Kelompok Tani
5. Pendampingan pembuatan Eco Enzym sebanyak 52 kelompok Tani
6. Pendampingan pembuatan Biosoka sebanyak 2 Kelompok Tani
7. Pemberian bantuan bibit jagung 20.040 kg kepada 196 Kelompok Tani



8. Pemberian bantuan bibit padi 12.500 kg kepada 36 Kelompok Tani
9. Pemberian bantuan bibit kacang tanah 600 kg
10. Pemberian bantuan bibit bawang merah 44.700 kg kepada 30 Koptan
11. Pemberian bantuan bibit kentang 2.800 kg kepada 4 Kelompok Tani
12. Pemberian bantuan bibit cabai merah 2,4 kg kepada 8 Kelompok Tani
13. Pemberian bantuan 260 Handsprayer kepada 12 Kelompok Tani
14. Pemberian bantuan Traktor roda 4 unit
15. Pemberian bantuan mesin pencacah 54 unit
16. Pemberian bantuan pompa air sebanyak 7 unit kepada 7 Kelompok Tani
17. Pemberian traktor roda 2 sejumlah 3 unit untuk 3 Kelompok Tani
18. Pembangunan 1 rumah kompos di Desa Pardomuan
19. Pemberian bantuan 336.900 kg kapur pertanian
20. Pembangunan JUT sepanjang 1.080 meter Huta Pitut-Sibaganding
21. Pembangunan JUT sepanjang 960 meter Simarhutang
22. Pembangunan Embung di Desa Sinabulan
23. Pengadaan alat mesin bor tanah beretenaga traktor 1 unit
24. Pembentukan Kelompok Tani Peduli Api di Desa Hariara Pohan



➤ **Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD**



Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total PAD terealisasi sebesar 10,65% dengan capaian kinerja sebesar 163,93%. PAD Sektor pariwisata tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 7.336.499.388 dari Total PAD sebesar Rp 66.844.480.269. Terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp 2.912.589.360 dari tahun 2021.

Jumlah wisatawan pada tahun 2022 juga mengalami

lonjakan yang besar mencapai 860.892 orang sehingga menyumbang PAD Sektor Pariwisata khususnya Retribusi Objek Pariwisata, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel.



Berbagai inovasi telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam peningkatan Pariwisata untuk menarik wisatawan nusantara dan mancanegara. Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir seperti peluncuran Visit Samosir Year, yang bekerja sama dengan para pelaku pariwisata. Promosi dilakukan dengan banyak cara, memanfaatkan *billboard* di pusat-pusat kota besar, termasuk *inflight magazine*, melalui media sosial dan media massa. Sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Samosir telah memiliki kalender pariwisata. Pemerintah Kabupaten Samosir juga menyiapkan berbagai *event* pariwisata seperti Horas Samosir *Fiesta*, *Cheerful Tourist Got Talent*, Gondang Naposo dan *Bataks Opera*, dan lain-lain.

## Sasaran ke - 6

### Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah

Dewasa ini, Perkembangan UMKM jumlahnya telah meningkat pesat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Daerah yaitu melaksanakan pembangunan ekonomi secara merata untuk semua daerah maka pembangunan di wilayah pedesaan menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah. Oleh sebab itu, realita perkembangan UMKM masih sangat sulit diterapkan khususnya di wilayah pedesaan di Kabupaten Samosir.

Penduduk Samosir dengan keterbatasan pengetahuan, hidup dalam kegiatan usaha kecil di sektor tradisional, infrastruktur dan akses pemerintahan yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kelompok wirausahawan desa (*Entrepreneurs Village*) melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang efektif memudahkan masyarakat untuk siap bersaing dalam pasar global.

Kabupaten Samosir sebagai tempat tujuan wisata, terus bergerak dengan berbagai program yang dirancang untuk memajukan UMKM. Dalam artian pemasarannya bukan hanya dalam negeri, melainkan harus bisa menembus mancanegara, agar perekonomian makin berputar kencang.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan peran UMKM dalam Perekonomian Daerah adalah Persentase Jumlah Usaha Kecil dan Menengah terhadap Total UMKM.

### ➤ **Persentase Jumlah Usaha Kecil dan Menengah terhadap Total UMKM**

Perkembangan (jumlah) UMKM di Kabupaten Samsir Tahun 2022 mengalami perkembangan yang signifikan pasca memulihnya pandemi Covid-19 di Kabupaten Samsir. Tahun 2021 jumlah UMKM adalah sebanyak 22.090 usaha dan pada tahun 2022 sebanyak 28.871 usaha dengan pencapaian pertumbuhan mencapai 30,70 persen.



Jumlah usaha kecil dan menengah di Kabupaten Samsir pada tahun 2022 adalah sebesar 3.140 sedangkan jumlah UMKM sebesar 28.871 usaha sehingga diperoleh Persentase Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

terhadap Total UMKM sebesar 10,91% dengan capaian kinerja 89,43%. Berbagai hal yang membuat capaian kinerja tidak tercapai adalah:

1. Lambannya aspek permodalan di kalangan pengusaha UMKM, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Bantuan Pembangunan Prasarana Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan UMKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah.
3. Pengembangan Skala Usaha Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Kemudian jika pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis.
4. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan

tetapi dalam realitasnya masih belum berjalan optimal. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif.

5. Kelemahan utama pengembangan UMKM di Samosir adalah karena kurangnya ketrampilan sumber daya manusia. Manajemen yang ada relatif masih tradisional. Oleh karena itu, dalam pengembangan UMKM perlu meningkatkan pelatihan baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembangan usaha.
6. Peningkatan Akses Teknologi Penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan UMKM. Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan UMKM adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi UMKM.

Upaya perbaikan ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan UMKM adalah:

1. Bantuan modal usaha dengan persyaratan ringan
2. Jaminan dalam mendapatkan kredit ringan
3. Promosi iklan gratis, memberikan orderan gratis
4. Kemudahan memperoleh kredit, pengurusan administrasi usaha
5. Dana UMKM terealisasi merata
6. Jadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang, dipasarkan oleh pemerintah
7. Bunga stabil & tidak mati lampu
8. Lebih memperhatikan sektor kecil
9. Bantuan KURS dipermudah
10. Agar dapat orderan proyek dari pemerintah

## **Sasaran ke - 7**

### **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan merupakan salah satu referensi dalam melihat kondisi lingkungan suatu daerah. Semakin rendah nilai IKLH, maka semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024. Dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Samosir, IKLH menjadi salah satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

➤ **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**



Penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak kerusakan lingkungan telah mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia, baik dari sisi materi maupun non materi termasuk ancaman terhadap kelangsungan hidup. Upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dan semua elemen masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya yang dilakukan, dikembangkan penilaian kualitas lingkungan hidup secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL).

❖ **Indeks Kualitas Air (IKA)**

Untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) harus dilakukan pemantauan Kualitas Air. Pemantauan kualitas air dilakukan melalui pemantauan air sungai, air danau Toba dan air baku di wilayah Kabupaten Samosir. Pemantauan air sungai dilakukan pada daerah sub DAS DTA (Daerah Tangkapan Air) danau Toba. Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Samosir dilakukan dua kali dalam satu tahun di 11 titik sampling.

Perhitungan Indeks Kualitas Air dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dengan rumus :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 - (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Dari rumus diatas, didapatkan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) Kab. Samosir Tahun 2022 adalah 56,36 yang masuk pada **Kategori Sedang**.

❖ **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Metodologi perhitungan Indeks Kualitas Udara mengadopsi Program European Union yaitu Common Air Quality Index seperti yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Nasional diterapkan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Samosir yaitu dengan metode pemantauan kualitas udara menggunakan metode *Passive Sampler*. Data kualitas udara merupakan data sekunder yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan menggunakan metode sampling *Passive Sampler*, dimana sampling dilakukan oleh UPTD. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Samosir dengan sumber kegiatan yaitu transportasi, industry, pemukiman dan perkantoran. Sampel udara yang telah diambil kemudian dikirim untuk dianalisa. Hasil analisa data kualitas udara tersebut kemudian diolah oleh UPTD. Laboratorium sehingga menghasilkan data Indeks Kualitas Udara Kabupaten Samosir.

*Tabel Titik Pantau Kualitas Udara di Kab. Samosir*

No.	Lokasi	LU	BT	Ket
1	Transportasi	02°37'25.85"	98°41'36.77"	Onan Baru
2	Industri	02°37'26.06"	98°41'35.12"	Sianting-anting
3	Pemukiman	02°36'5.28"	98°42'6.22"	Putri Lopian
4	Perkantoran	02°40'52.7"	98°42'22.47"	Parbaba

*Tabel Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Udara Pantau Kualitas Udara*

Rataan per parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu		Rataan	IKU
NO2 (µg/m3)	SO2 (µg/m3)	NO2 (µg/m3)	SO2 (µg/m3)	Indeks	
8.34125	6.23	0.22	0.28	0.249625	91.11

Nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Samosir masuk pada kategori **SANGAT BAIK**.

#### ❖ Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan luas hutan dibandingkan dengan luas wilayah administrasinya dengan rumus:

$$ITH = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \left( \frac{T}{L} - D \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Dari rumus diatas, dilakukan perhitungan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Samosir Tahun 2022 sehingga didapat nilai IKLH adalah **54.23**.

Berdasarkan pengukuran IKLH Kabupaten Samosir yang dilakukan pada Tahun 2022, maka IKLH dihitung dengan menggunakan rumus  $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

Realisasi IKLH Kabupaten Samosir adalah **69,96** termasuk pada **Kriteria Sedang** dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestik melalui gerakan bersih sungai dan bersih danau;
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan IPAL komunal; dan
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha/kegiatan.

## Sasaran ke - 8

### Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk memenuhi harapan masyarakat di wilayah Kabupaten Samosir. Pemenuhan permintaan infrastruktur akan disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan bagi masyarakat setempat.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur adalah:

1. Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap
2. Persentase Panjang Jalan Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik
3. Persentase Rumah Layak Huni
4. Persentase Layanan Air Bersih

#### ➤ Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

Pembangunan prasarana jalan merupakan kebutuhan utama dalam mendukung aktifitas lalu lintas dan aksesibilitas menuju Kabupaten Samosir dan objek-objek wisata di Kabupaten Samosir. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Samosir meliputi sistem jaringan primer, sekunder, lokal, dan jalan lingkungan. Panjang jalan dalam kondisi mantap Kabupaten Samosir pada tahun 2022 terealisasi sebesar 64,40% atau sepanjang 116,87 km yang terdiri dari jalan kondisi baik sebesar 96,09 km dan kondisi sedang 20,78 km dari panjang jalan strategis sebesar 175,96 km.

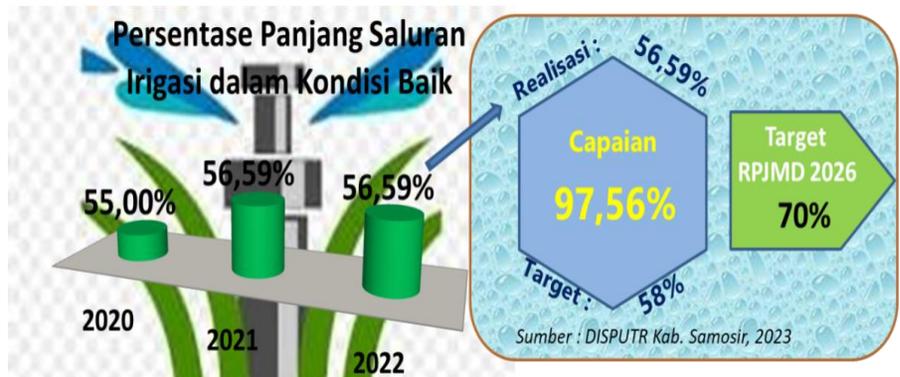
Formula perhitungan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap :

$$\frac{\text{Panjang jalan strategis dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan Strategis}} \times 100\%$$



➤ **Persentase Panjang Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik**

Pencapaian Pembangunan Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik untuk mengairi sawah pada Tahun 2022 adalah sebesar 1.477 Hektar dari total Luas Daerah Irigasi Kabupaten Samsir sebesar 2.610 Hektar dengan capaian kinerja sebesar 97,56%. Hal ini tidak tercapai karena adanya penundaan DAK pada Irigasi.



Formula perhitungan persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik :

$$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Panjang total jaringan irigasi}} \times 100\%$$

Upaya perbaikan ke depan dalam meningkatkan saluran irigasi di Kabupaten Samsir adalah dengan menambah anggaran pada pembangunan irigasi.

➤ **Persentase Rumah Layak Huni**

Persentase Pencapaian Pembangunan Rumah Layak Huni pada tahun 2022 adalah sebesar 27.434 rumah dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Samsir sebanyak 33.117 dengan realisasi sebesar 82,56% dan capaian kinerja 97, 56%. Hal ini tidak tercapai karena keterbatasan anggaran.

Upaya perbaikan ke depan yang didapat dilakukan adalah dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan penambahan kuota melalui Kementerian PUPR dan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Sosial

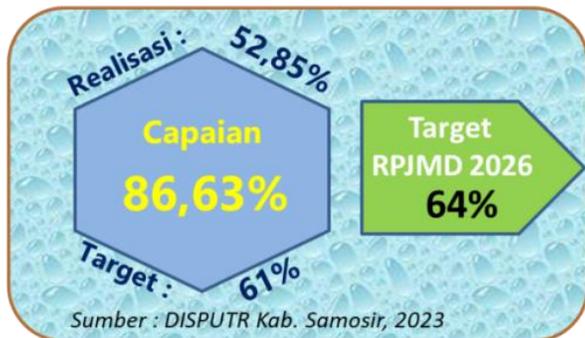
Formula perhitungan persentase rumah layak huni :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah}} \times 100\%$$

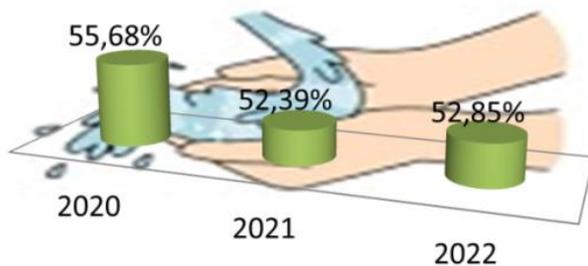


### ➤ **Persentase Layanan Air Bersih**

Persentase Layanan Air Bersih terealisasi 52,85% dengan capaian kinerja sebesar 86,63%. Pengguna layanan air bersih pada tahun 2022 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir adalah sebanyak 17.840 rumah dari jumlah total rumah 33.754 rumah tangga. Tidak tercapainya target ini disebabkan karena bertambahnya jumlah rumah tangga di Kabupaten Samosir secara signifikan dari 33.117 Rumah Tangga menjadi 33.754 rumah tangga. Terjadi peningkatan jumlah rumah tangga sebanyak 637 rumah tangga. Faktor berikutnya adalah



### **Persentase Layanan Air Bersih**



sangat terbatasnya APBD Kabupaten Samosir untuk Bidang Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta minimnya anggaran yang disetujui oleh Kementerian PUPR pada usulan kegiatan Bidang Air Minum tahun 2022. Kondisi saat ini distribusi air minum yang dikelola oleh PDAM Provinsi Sumatera utara masih sangat terbatas hanya dapat menjangkau rumah-rumah penduduk sepanjang Jalan Nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor jarak dan elevasi

permukiman yang tidak dapat dijangkau oleh tekanan air yang tersedia saat ini, dimana kondisi saat ini sumber air yang digunakan adalah dari Danau Toba secara pompanisasi. Untuk dapat menjangkau permukiman yang belum terdistribusi air minum dibutuhkan sumber air baru yang elevasinya jauh diatas permukaan air Danau Toba sehingga pendistribusian air dapat dilakukan secara gravitasi.

Upaya perbaikan kedepan guna mencapai target persentase layanan air bersih dibutuhkan Kerjasama antar Lembaga baik Eksekutif maupun Legislatif. Khususnya dalam hal ini perlu dijalin koordinasi dengan lembaga baik di Provinsi Sumatera Utara maupun dari Kementerian PUPR yang memiliki kewenangan dalam penanganan Air Bersih.

Formula perhitungan persentase layanan air bersih:

$$\frac{\text{Jumlah Pengguna Air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

## Sasaran ke – 9

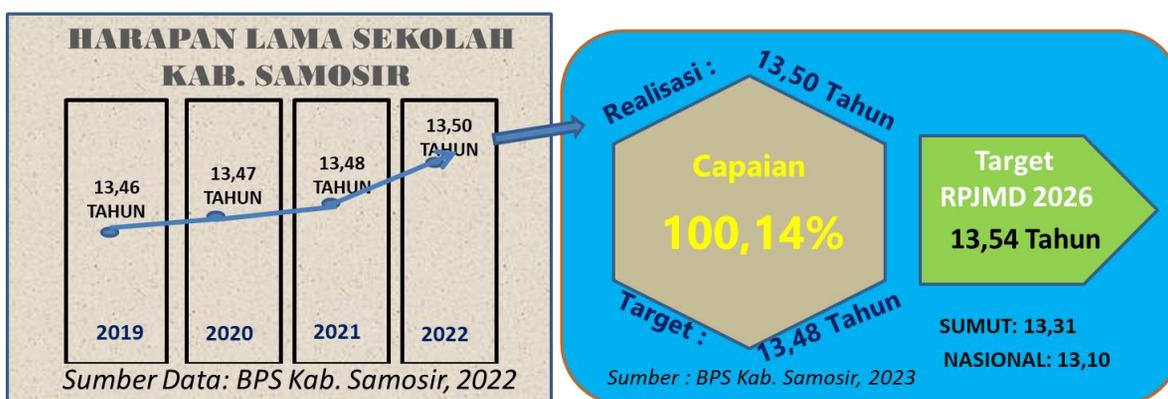
### Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Kabupaten Samosir terus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat adalah Harapan Lama Sekolah.

#### ➤ Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Samosir



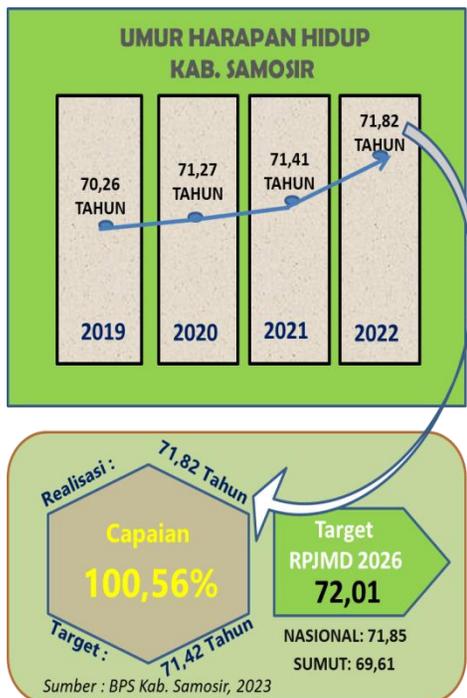
pada tahun 2022 terealisasi sebesar 13,50 dengan capaian kinerja sebesar 100,14%. Masih diatas HLS Provinsi Sumatera Utara sebesar 13,31 tahun dan HLS Nasional 13,10 tahun.

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Samosir pada tahun 2022 sebesar 13,50 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,50 tahun atau setara dengan Diploma II. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan HLS yakni melalui program sosialisasi pendidikan berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini berbentuk serangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi minat belajar di PAUD dan Pendidikan Dasar, peningkatan sarana prasarana satuan pendidikan, Pengaktipan PKBM, dan peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

## Sasaran Strategis ke - 10

### Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi



serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan,

pendanaan dan manajemen kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Samosir sangat konsen dengan kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat dari Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang menekankan pada aspek Peningkatan Masyarakat dan *tag line* “bohama” yang merupakan singkatan dari *bo* yang artinya bosur, *ha* artinya hipas dan *ma* artinya malo adalah berarti Rakyat tidak Lapar, Rakyat tidak Sakit dan Rakyat tidak Bodoh.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat adalah Umur Harapan Hidup.

#### ➤ Umur Harapan Hidup (UHH)

Definisi Umur Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Perhitungan dan pengolahan data untuk mengukur realisasi Angka Umur Harapan Hidup merupakan hasil pengolahan data dan perhitungan yang dilaksanakan oleh BPS. UHH Kabupaten Samosir terealisasi sebesar 71,82 Tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,56%, masih diatas UHH Provinsi Sumatera Utara sebesar 66,91 tahun dan sedikit dibawah UHH Nasional sebesar 71,85 Tahun.

Pemerintah Kabupaten Samosir telah meraih Penghargaan Universal Health Coverage (Uhc) dimana 139,041 jiwa atau mencapai 97,7% masyarakat Kabupaten



Samosir telah mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga berhasil menurunkan angka stunting sebesar 2,1 persen dari angka 28,4 persen menjadi 26,3 persen, serta memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir adalah:

1. Kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), kesehatan reproduksi, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
4. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.



### Sasaran Strategis ke - 11

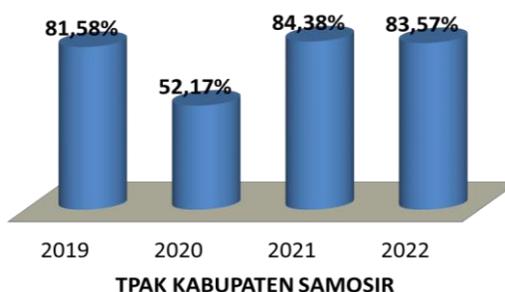
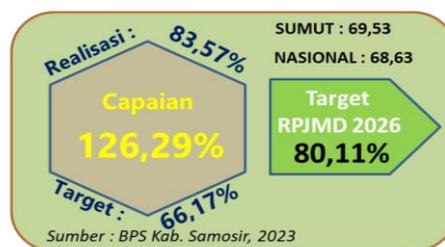
#### Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah menumbuhkan semangat wiraswasta dalam kehidupan masyarakat, berani mengambil resiko, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menumbuhkan hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi potensial dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengeluaran Perkapita (Kemampuan Daya Beli).

#### ➤ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir pada tahun 2022 berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Samosir pada tahun 2022 sebesar 74.426 jiwa atau



menurun sedikit sebanyak 32 jiwa bila dibanding angkatan kerja tahun 2021 yaitu sebesar 74.458 jiwa. Hal ini menyebabkan terjadi penurunan TPAK yakni dari 84,38 persen pada tahun 2021 menjadi 83,57 persen pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 126,29%. Pada tahun 2022, TPAK Kabupaten Samosir masih di atas TPAK Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,53% dan Nasional sebesar 68,63%

➤ **Pengeluaran perkapita**

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Samosir tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 8.991.000 dengan capaian kinerja sebesar 103,03%. Capaian ini masih dibawah Pengeluaran Perkapitan Nasional sebesar Rp 11.479.000 dan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 10.848.000.

Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan dasar dalam perekonomian disamping kegiatan produksi. Konsumsi yang dilakukan oleh seseorang dapat mencerminkan kondisi sosial ekonominya. Semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang maka semakin tinggi kondisi perekonomiannya dan tingkat kesejahteraannya. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Pengeluaran Penduduk Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021-2022, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Samosir mengalami kenaikan, yaitu dari Rp. 1.124.111,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.243.086,- pada tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 10,58 persen. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan tahun 2022 tersebut terdiri dari pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar Rp. 710.636,- (57,17 persen) dan pengeluaran untuk kelompok non makanan sebesar Rp. 532.450,- (42,83 persen). Pada pengeluaran kelompok makanan, penduduk Kabupaten Samosir melakukan pengeluaran paling dominan pada komoditas makanan minuman jadi sebesar 11,56 persen, diikuti dengan komoditas rokok sebesar 8,97 persen, komoditas padi-padian sebesar 8,06 persen, komoditas ikan/udang/cumi/kerang sebesar 7,72 persen, dan komoditas sayur-sayuran sebesar 5,14 persen. Sementara itu, pada kelompok non makanan, penduduk Kabupaten Samosir melakukan pengeluaran paling dominan pada komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 16,31 persen, diikuti komoditas aneka komoditas dan jasa sebesar 11,51 persen, dan komoditas pajak, pungutan, dan asuransi sebesar 4,67 persen.



## Sasaran Strategis ke - 12

### Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal

Kabupaten Samosir memiliki kebudayaan yang cukup unik dan beragam. Oleh karena itu, pelestarian budaya merupakan agenda prioritas yang harus dilakukan dalam rangka menjaga budaya lokal untuk mendukung kegiatan pariwisata. Pelestarian budaya lokal penting dilakukan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Samosir. Kegiatan tersebut merupakan upaya melindungi kebudayaan dari kemusnahan. Dengan pelestarian kebudayaan lokal, nilai dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang tetap dapat dipertahankan pada setiap generasi.

Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya dalam pelestarian kebudayaan lokal yaitu dengan menggelar *focus*



*group discussion* (FGD) dengan mengundang para Budayawan (Toba, Karo, Simalungun, Angkola-Mandailing, Pakpak/Dairi), Arkeolog dan Antropolog untuk membahas asal-muasal (titik nol) Peradaban Batak. Pelaksanaan FGD tersebut disepakati bahwa Gunung Pusuk Buhit yang berada di Kabupaten Samosir menjadi Titik Nol Peradaban Batak. Penetapan titik nol Peradaban Batak diharapkan memperkuat

Ideologis Peradaban Batak, mendukung pengembangan pariwisata yang berbasis ramah lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat pada masa mendatang.

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Lokal adalah Persentase peningkatan jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi.

#### ➤ **Persentase peningkatan jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi**

Persentase peningkatan jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi terealisasi sebesar 20,66% dengan capaian kinerja 126,74%. Perhitungan ini diperoleh dari Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda Yang Diapresiasi dibagi Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang di inventarisasi dikali 100 %



Jumlah Budaya Benda yang Diapresiasi adalah objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejumlah 42 objek (benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya) dari Jumlah Budaya Benda yang telah di inventarisasi sebanyak 178 objek.

Sedangkan jumlah Budaya Tak Benda Yang Diapresiasi adalah objek budaya tak benda yang mendapat perlakuan yakni sejumlah 14 objek dari jumlah budaya tak benda yang di inventarisasi sebanyak 93 objek.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal adalah:

1. Mengadakan kegiatan festival budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal.
3. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya.
4. Selalu mempertahankan budaya Batak agar tidak punah.
5. Mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal.

## **6.6 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Target kinerja sasaran yang dicapai selama tahun 2022, di dukung melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan baik program strategis yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran, maupun program/kegiatan yang bersifat pendukung. Secara umum pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian masing-masing sasaran dapat terlaksana dengan baik.

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada capaian kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila dapat tercapai. Dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang direncanakan. Dari 12 (dua belas) sasaran strategis, terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, kinerja mencapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,24%.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja mencapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,96%.
3. Meningkatnya PDRB sektor unggulan, kinerja mencapai 215,57% dengan efisiensi anggaran sebesar 28,47%.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, kinerja mencapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,17%.
5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, kinerja mencapai 100,14% dengan efisiensi anggaran sebesar 29,80%.
6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, kinerja mencapai 100,56% dengan efisiensi anggaran sebesar 12,10%.
7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kinerja mencapai kinerja mencapai 114,66% dengan efisiensi anggaran sebesar 25,52%.
8. Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal, kinerja mencapai 126,74% dengan efisiensi anggaran sebesar 8,03%.